

34. Pendaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
1	Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya	a. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya											
		1) Proses pengusulan dan penetapan pembangunan Tahura	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
		2) Perencanaan :											
		a) Penataan Blok Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
		b) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
		c) Kerjasama Pengelolaan Kawasan Tahura	Jumlah Perjanjian Kerja Sama	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
		d) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
		3) Pengelolaan :											
		a) Penanganan open area (area terbuka) melalui penanganan konflik tenurial di Kawasan Tahura	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Ha
		b) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tahura bersama Masyarakat	unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		c) Pengelolaan daerah penyangga Tahura	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
		d) Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik melalui perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Kehati, Spesies dan Genetik di Tahura, melalui Inventarisasi dan Pemantauan Potensi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0017	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Hektar
		4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan											
		a) Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan pemanfaatan hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang ditindaklajuti	Permohonan
		b) Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		c) Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan pemanfaatan hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang ditindaklajuti	Permohonan
		5) Pengelolaan sampah di Dalam Kawasan dan sekitar Kawasan tahura sesuai kewenangannya											

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		a) Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah	Dokumen	1. Pemerintah 2. Pengelola Tahura 3. Masyarakat	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Unit
		b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok
		c) Pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, pendauran ulang sampah)	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Terlaksananya Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton
					2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui Pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan
					2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton
		d) Penanganan sampah (pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, pengangkutan,)	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton
					2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase
					2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton
					2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton
		e) Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk Kegiatan pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan pemrosesan Akhir	Unit
		f) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPS/TPST/TPS3R	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk Kegiatan pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan pemrosesan Akhir	Unit
		g) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		h) Sosialisasi dan edukasi Pengelolaan Sampah	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan
		i) Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan wisata dalam pengelolaan sampah	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dokumen
		j) Monitoring dan evaluasi	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan
6) Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem													
		a) Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya pemulihan ekosistem Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
		b) Penanaman bersama Masyarakat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya pemulihan ekosistem Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
		c) Pemeliharaan Tanaman bersama Masyarakat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya pemulihan ekosistem Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
	b.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tahura											
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	Hektar/Spot	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		3) Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		4) Penyadartahuan Masyarakat	Desa/kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa
		5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		6) Pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung dan kantong air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya pemulihan ekosistem Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
		7) Pembuatan sistem peringatan dini karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksananya Pengamanan Kawasan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		8) Pendampingan dan peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat (praktek pembukaan lahan tanpa bakar; pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar; pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; dsb)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	TAHURA Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		9) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla, penyebarluasan informasi melalui Peta, infografis atau sejenisnya	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		10) Penerapan deteksi dini (melalui menara pengawas, kamera/CCTV, penginderaan jauh)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		11) Pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi hotspot (Unit)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		12) Penetapan posko dalkarhutla dan level kesiagaannya;	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		13) Pemadaman (pengukuran api atau size up, pembuatan ilaran api udara, penyapuan bara api atau mopping up, dsb)	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		14) pengadaan dan pemeliharaan sarpras dalkarhutla.	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Hutan Raya											
		1) Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Lokasi):											
		a) Penghitungan luas areal terbakar	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		b) Analisa dampak dan penaksiran kerugian	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		c) Detasering terhadap areal pasca karhutla	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kawasan Pengamanan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
		2) Pemulihan ekosistem areal bekas terbakar yang melibatkan masyarakat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha
		3) Penanganan Kasus :											
		a) Koordinasi dalam rangka investigasi dan penyidikan penyebab kejadian karhutla	Kali	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
		b) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum (bila perlu)	Kali	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
2	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	a. Penyebarluasan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per Jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per Jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per Jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per Jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
		e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi /Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan kewenangannya:											
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/kelompok masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan
i.		Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
j.		Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
k.		Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhuta	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen
l.		Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan
m.		Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhuta (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
n.		Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhuta											
		1) Kendaraan bermotor khusus dalkarhuta	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
					X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		2) Kendaraan/transportasi air	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
					X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		3) Pompa Jingga	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
4)	Pompa Induk	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
5)	Pompa Apung	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
6)	Selang	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
7)	Nozzle	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
8)	Peralatan tangan	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
9)	Pompa Punggung	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
10)	Peralatan Pribadi (APD)	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
11)	Perlengkapan Regu	Unit	Pemerintah	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	
				X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	
o.	Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko Pos	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	
p.	Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Untuk menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	
q.	Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan yang sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		r. Pendirian posko Karhutla	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota dengan dinyatakan yang sah/legal paling lama 1 (satu) tahun	Dokumen
3	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya	a. Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi/Hektar	Pemerintah	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan Lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan
		b. Perhitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan dengan citra satelit (inventarisasi luas karhutla)	Hektar	Pemerintah	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan Lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan
		c. Penaksiran kerugian	Hektar	Pemerintah	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan Lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan
		d. Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/Lokasi	Pemerintah	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan Lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan
4	Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	a. Pembibitan	Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
		b. Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
		c. Penanaman pada kawasan perlindungan setempat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		d. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
5	Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	a. Perencanaan RTH	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
		b. Perancangan teknik RTH	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
		c. Pelaksanaan pembangunan RTH	Luas lahan/ Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
		d. Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH	Luas lahan/ Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
6	Penyuluhan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga
		b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
		c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang
		d. Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
		e. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang sehat	Keluarga	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga
7	Konservasi sumberdaya alam dan hayati ekosistemnya	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :											
		a. Patroli Pengamanan bersama Masyarakat	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan
		b. Penyediaan Sarpras Pengelolaan	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		c. Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Orang
		d. Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		e. Pemulihan Ekosistem/Peminaan Habitat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	HA
					2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
		8	Pengelolaan keekaragaman hayati	a. Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun
b. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik	Dokumen			1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
c. Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)	Unit			1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
d. Pencadangan sumber daya alam hayati melalui pengelolaan Taman Kehati melalui penanaman Pohon Langka sesuai Ekoregion dan Ruang Terbuka Hijau (Jenis)	Jenis			1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
e. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Hutan, diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian kawasan alam	Unit			1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
9	Program strategis lainnya ditetapkan oleh Pemerintah	a. Penguatan perekonomian daerah, antara lain meliputi:											
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i> oleh bupati/walikota	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
		2) Penyediaan sarana dan prasarana	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan kegiatan lainnya	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha
					2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemandagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
		4) Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan kegiatan lainnya	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha
					2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
		5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
		6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang
					2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
					2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang
		7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
		8) Pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) .	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) .	Lokasi
		9) Penelitian dan pengembangan	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
					5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
		b. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen
					5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
		c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasilkan	Kegiatan/Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
		d. Dukungan Kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR Kab/Kota	Kegiatan/Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
e.		Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kesejahteraan dan Fasilitas Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang
					2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terseleenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan
f.		Pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton
					2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Terlaksananya Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton
					2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase
					2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk Kegiatan pemilahan, Pengumpulan, Pengolahan, dan pemrosesan Akhir	Unit
					2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Terlaksananya Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton
g.		Pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM
					1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
<i>Folu net sink 2030 subnational dalam rangka</i>													
h.		1) Penyusunan Rencana Kerja folu Net Sink 2030	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
					5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
					5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/ Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan